

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan (superior) kepada bawahannya (subordinates) (Khusaini ,2019 : 4)

Menurut Munandar 2014: 1, “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”. Menurut Nafarin 2016: 11, mendefinisikan bahwa “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa”.

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Menurut Hansen dan Mowen (2016: 1), Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan.

Anggaran belanja merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Dan anggaran belanja diunakan sebagai alat kebijakan di bidang fiskal disamping fungsinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah digunakan sebagai pendorong perekonomian secara agregat disaat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya. Belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal dan berfungsi sebagai bentuk intervensi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis melalui berbagai pendekatan fleksibilitas maupun mengurangi jalur birokrasi untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada kementerian/ lembaga. Dengan langkah tersebut diharapkan belanja APBN dapat lebih berdampak terhadap perekonomian khususnya pada sektor riil, sehingga APBN dapat lebih tercermin sebagai fungsi stabilisasi dan distribusi.

Belanja pemerintah pusat yang ada dalam struktur APBN dirinci menjadi beberapa jenis belanja dalam DIPA, dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian realisasi anggaran Kementerian/Lembaga. Besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan *output* pada Kementrian/Lembaga, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian.

Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan

akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil dilapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Perencanaan anggaran yang tidak akurat juga mengakibatkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilakukan revisi, sebelum pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Kegiatan dan program juga belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran. Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pencatatan Administrasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi sangat diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai, bukti pencatatan, pengambilan keputusan dan pelaporan sehingga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dengan baik. Kementerian keuangan mengungkapkan lambatnya proses pencairan anggaran untuk pembayaran proyek kepada kontraktor sering kali disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah (Krisdiartiwi,2008 : 5).

Selain itu kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Halim 2014 kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya

penyerapan anggaran. semua kompetensi sumber daya manusia tersebut sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Bagaimanapun kemajuan teknologi yang digunakan tanpa adanya dukungan sumber daya manusia akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia akan bekerja dengan semua kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh lingkungan birokrasi. Birokrasi menurut Aldita 2018, adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik hierarki, difirensiasi dan kualifikasi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensiasi yang dimaksud perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi adalah seorang birokrat hendaknya memiliki kualifikasi atau kompetensi untuk melaksanakan tugas atau wewenangnya secara profesional. Lingkungan birokrasi yang mempengaruhi birokrasi pemerintah akan berdampak pada berjalan lancar atau tidaknya kegiatan operasional pemerintah. Aturan dan prosedur yang mengikat dan terkoordinasinya sumber daya manusia akan mempengaruhi praktik birokrasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi sangat mempengaruhi penyerapan anggaran secara maksimal dan proporsional.

Pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang di terbitkan tersebut adalah permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan tarsebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD

yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo. Namun, adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi fenomena yang telah terjadi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Nagekeo. Fenomena tersebut menyorot perhatian public karena fenomena ini terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Fenomena memberikan gambaran adanya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo yang masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah Bersama DPRD sebelum atau sesudah 31 Desember.

Menurut Bahrudin (2012: 97) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintahan daerah yang mencangkup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran atau pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang di sebut peraturan Daerah. Dalam kebijakan yang utama pemerintahan daerah Kabupaten Nagekeo anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan sebagai unit kerja.

Kegagalan target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan infektivitas pengalokasian anggaran. (Cardisiawan, 2009).

Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya adalah faktor perencanaan, faktor administrasi dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran (Jumriani dan Ardana 2018). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dokumen Perencanaan Pencatatan administrasi, Sumber daya manusia, dan Uang Persediaan berpengaruh

terhadap penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuriza 2019 tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel perencanaan anggaran, catatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran sedangkan variabel lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumriani (2018) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa dokumen perencanaan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Bayu (2021) tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada OPD Provinsi Riau) Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo”.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah yang diambil adalah: Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo?
2. Apakah pencatatan administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo
- b. Untuk mengetahui pengaruh pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo

- c. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis tentang penerapan serta pengembangan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah.
- 2) Bagi organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nagekeo
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi bagi penulis lainnya yang ingin membahas masalah ini dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk menjadikan bahan masukan bagi kemajuan dan perkembangan BAPPEDA dalam pengambilan keputusan kebijakan dan penyusunan perencanaan di masa yang akan datang.
- 3) Diharapkan penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk dapat meneliti dan mengembangkan teori sebagai referensi untuk selanjutnya